

DETERMINASI KESADARAN WP EMKM KOTA PONTIANAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Khristina Yunita ^{1)*}, Ira Grania Mustika ²⁾, Tiya Nurfauziah ³⁾

^{1,2,3)}Universitas Tanjungpura, Indonesia

*E-mail: ¹khristina.yunita@ekonomi.untan.ac.id, ²igraniamustika@yahoo.co.id,
³tiya.nurfauziah@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, layanan layanan petugas pajak, dan persepsi atas kontraprestasi tidak langsung. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan responden yang merupakan WP EMKM di Kota Pontianak dan sudah memiliki NPWP. Hasil analisa data menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, layanan layanan petugas pajak, persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung secara bersama – sama mampu mempengaruhi WP EMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: kewajiban perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, layanan layanan petugas pajak, persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung.

Abstract

This study trying to analyze the determination of WP EMKM to fulfill the taxation obligation. This study consists of three independent variables and one dependent variable. The independent variables in this study are understanding of tax regulations, tax officer services, and perceptions of indirect counter-achievement. The dependent variable in this study is taxation obligation. This research uses a survey method with WP EMKM as the respondents and already have tax id number. The results of the data analysis show that knowledge and understanding of taxes, tax officers services, and perceptions of counter-performance are simultaneously influence WP EMKM to fulfill their tax obligations.

Keywords: tax obligations, understanding of tax regulations, tax officer services, perceptions of indirect counter-achievement.

Bagian ini diisi oleh Tim Editor

Article History:	Received: 14 th Desember 22	Revised: 14 th Desember 22	Accepted: 14 th Desember 22
------------------	--	---------------------------------------	--

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak mempunyai peranan sangat penting untuk melanjutkan pembangunan berbagai bidang. Pajak menurut Adriani (2010) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan perpajakan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan mampu meningkat perannya dari 67,1% pada tahun 2008 menjadi 73,3% pada tahun 2012. Tahun 2013 ternyata mampu mencapai 76,5% atau sebesar Rp 1.099,1 Triliun dari targetnya dalam APBNP 2013 (Ihsan, 2013). Penarikan pajak pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, tetapi karena pengetahuan masyarakat mengenai pajak masih rendah sehingga masyarakat lebih merasa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan dan memajukan Negara.

Terdapat persepsi yang berkembang saat ini di masyarakat yaitu bahwa dalam pemungutan pajak, fiskus akan berusaha untuk mengenakan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya. Persepsi dari sisi fiskus yang salah ini berkembang dari persepsi yang kurang tepat bahwa fiskus mengenakan pajak dilatarbelakangi oleh target-target penerimaan. Secara makro persepsi ini mungkin benar, apalagi saat ini pajak menjadi sumber utama pemasukan dana pembangunan dari dalam negeri sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak. Tetapi secara mikro bahwa fiskus akan mengenakan pajak yang sebesar-besarnya sama sekali tidak benar, karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak seorangpun akan dikenakan pajak melebihi dari yang seharusnya.

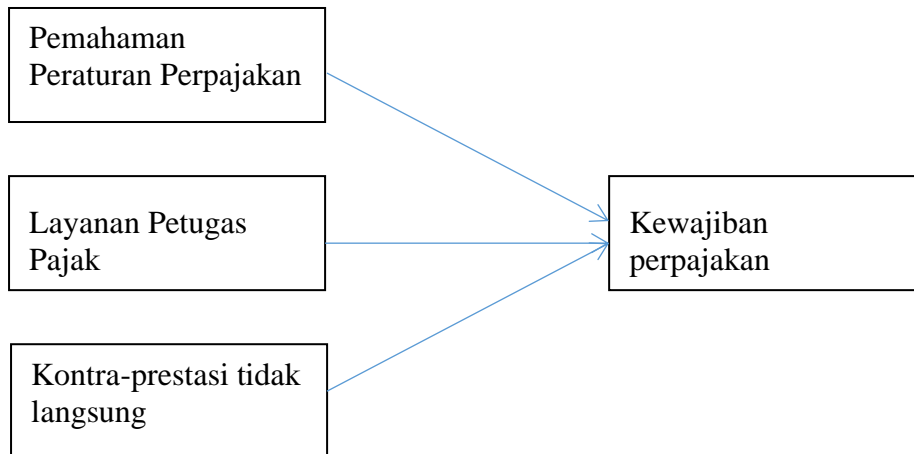
Sebaliknya dari sisi wajib pajak, persepsi bahwa wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak yang sekecil-kecilnya juga sama sekali tidak benar. Persepsi ini mungkin berkembang dari sistem pemungutan pajak yang lama. Sebagai warisan kolonial, sistem pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan dan jauh dari pertimbangan kepada hak azasi rakyat. Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh, sehingga wajar apabila saat itu wajib pajak dengan segala cara berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya sekecil mungkin.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Kepatuhan WP disini bukan sekedar membayar pajak tetapi juga melaksanakan pelaporan. Ada beberapa jenis WP salah satunya adalah WP pemilik EMKM, yaitu pemilik EMKM yang memiliki NPWP dan memiliki usaha dengan omzet di bawah 4,8 M. Salah satu kelemahan yang mereka miliki adalah sering tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah pelaporan. Beberapa wawancara di awal menunjukkan bahwa mereka membayar pajak tetapi seringkali lupa untuk melaporkannya secara online. Hal ini yang

kemudian mendorong penelitian ini dilakukan, terutama untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mau melaksanakan kewajiban perpajakan.

LANDASAN TEORI

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Hipotesis yang diturunkan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut.

H₁ : Peraturan perpajakan mempengaruhi kewajiban perpajakan secara signifikan.

H₂ : Layanan petugas pajak mempengaruhi kewajiban perpajakan secara signifikan.

H₃ : Kontraprestasi tidak langsung mempengaruhi kewajiban perpajakan secara signifikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu survey. Respondennya adalah WP EMKM yang berada di wilayah Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan dengan ketentuan memiliki omzet di bawah 4,8 M dan memiliki NPWP. NPWP menjadi kewajiban karena dengan memiliki NPWP, berarti wajib pajak diasumsikan memiliki account representative (AR) yang bisa memberikan konsultasi perpajakan dan wajib pajak paham mengenai kewajiban mereka di bidang perpajakan.

Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan oleh WP EMKM akan mempengaruhi persepsi WP terhadap sistem perpajakan yang adil. Pemahaman yang semakin baik akan mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Kurnia, 2010:141). Pemahaman peraturan perpajakan terdiri atas 11 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan STS (1) sampai SS (1).

Layanan Layanan petugas pajak

Layanan layanan petugas pajak merupakan tanggapan WP terhadap pelayanan layanan petugas pajak dan tingkat profesionalisme aparat pajak dalam melayani wajib pajak. Layanan petugas pajak dituntut untuk lebih tanggap dan kompeten dalam berbagai hal yang terkait pajak. Layanan disini termasuk pengetahuan, keahlian, pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, dan profesionalisme. KPP selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik sehingga WP merasa nyaman dan ini akan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Layanan layanan petugas pajak terdiri atas 9 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan STS (1) sampai SS (1).

Persepsi Kontraprestasi Tidak Langsung

Persepsi kontraprestasi merujuk pada persepsi WP pada imbalan yang mereka nikmati secara tidak langsung pada waktu yang akan datang. Hasil pemenuhan kewajiban perpajakan salah satunya didorong oleh pemikiran tentang apa yang akan didapatkan oleh WP sesudah menunaikan kewajibannya. Meskipun bersifat tidak langsung, WP menyadari manfaat tersebut misalnya adalah dengan peningkatan layanan dan kemudahan pelaporan perpajakan termasuk juga layanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Variabel persepsi kontraprestasi terdiri atas 8 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan STS (1) sampai SS (1).

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang menjadi variabel penelitian ini adalah kewajiban perpajakan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh WP. WP secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Kewajiban perpajakan ini terdiri atas 12 pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala likert dengan pernyataan STS (1) sampai SS (1).

Teknik Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum memasuki pengujian regresi linear berganda, maka terlebih dahulu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas serta pengujian asumsi klasik.

Uji Validitas (*Validity Test*)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui item valid atau tidak dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan/ indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas (*Reability Test*)

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran kehandalan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *CronbachAlpha* (α). Suatu variabel dikatakan handal (*reliable*) jika memberikan nilai (α) > 0,60 (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang diperoleh terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011:102). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat dari *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga nilai tolerance yang rendah sama dengan *variance inflation factor* (VIF) yang tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006:105). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser.

Model Regresi

Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel *independent* yang terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan, layanan layanan petugas pajak, dan persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung terhadap variabel dependen yaitu kewajiban perpajakan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji F

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada uji F, maka Fhitung akan dibandingkan dengan F tabel.

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Gambaran Umum Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *random* atau secara acak yang secara kebetulan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Lokasi penyebaran dilakukan di empat Kecamatan yang ada di Kota Pontianak yaitu Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan. Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 50 namun kuesioner yang kembali hanya 39. Dari 39 kuesioner yang kembali, hanya 30 yang bisa digunakan sedangkan yang 9 kuesioner lainnya menyatakan bahwa responden tidak memiliki NPWP.

Tabel 1 Distribusi Kuesioner dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner yang dibagikan	50
Total kuesioner yang dikembalikan	39
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(9)
Total kuesioner yang dapat diolah	30

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, maka karakteristik responden adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
1. Berdasarkan Jenis Kelamin		
a. Pria	17	56%
b. Wanita	13	44%
Total	30	100%
2. Berdasarkan Usia		
a. < 25 tahun	3	10%
b. 25-35 tahun	10	33%
c. 35-45 tahun	10	33%
d. > 45 tahun	7	24%
Total	30	100%
3. Berdasarkan Bidang Usaha		
a. Bengkel	2	7%
b. Retailer/ swalayan	3	10%
c. Elektronik	1	3%
d. Rumah Makan	8	26%
e. Furniture	2	7%
f. Besi dan Bangunan	2	7%
g. Salon	1	3%

h. Lain-lain	11	37%
Total	30	100

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil Uji Validitas Data

Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pada aspek pengetahuan tentang pajak yang terdiri dari 11 pertanyaan, setelah dilakukan pengujian dengan teknik *Pearson Correlation*, semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikansi < 0.05 .

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Q1	0.802	0.000	Valid
Q2	0.561	0.001	Valid
Q3	0.575	0.001	Valid
Q4	0.419	0.021	Valid
Q5	0.895	0.000	Valid
Q6	0.786	0.000	Valid
Q7	0.650	0.000	Valid
Q8	0.582	0.001	Valid
Q9	0.361	0.050	Valid
Q10	0.830	0.000	Valid
Q11	0.527	0.003	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Validitas Layanan Layanan petugas pajak

Setelah dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan *Correlation Pearson* terhadap 9 item pertanyaan, semua r hitung yang diperoleh < 0.05 , hal ini berarti bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Layanan Layanan petugas pajak

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Q1	0.685	0.000	Valid
Q2	0.569	0.001	Valid
Q3	0.425	0.019	Valid
Q4	0.627	0.000	Valid
Q5	0.721	0.000	Valid
Q6	0.818	0.000	Valid
Q7	0.719	0.000	Valid
Q8	0.579	0.001	Valid
Q9	0.563	0.001	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Validitas Kontraprestasi Tidak Langsung

Pada aspek kontraprestasi tidak langsung yang terdiri dari 8 pertanyaan, diperoleh nilai r hitung < 0.05 yang berarti bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kontraprestasi Tidak Langsung

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Q1	0.484	0.007	Valid
Q2	0.641	0.000	Valid
Q3	0.789	0.000	Valid
Q4	0.562	0.001	Valid
Q5	0.818	0.000	Valid
Q6	0.648	0.000	Valid
Q7	0.733	0.000	Valid
Q8	0.689	0.001	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Validitas Kewajiban Perpajakan

Aspek kewajiban perpajakan terdiri dari 12 pertanyaan. Sama halnya dengan pengujian pada aspek yang lain, semua item pertanyaan menunjukkan nilai r hitung < 0.05 yang berarti bahwa semua item pertanyaan valid.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban Perpajakan

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Q1	0.708	0.000	Valid
Q2	0.747	0.000	Valid
Q3	0.733	0.000	Valid
Q4	0.778	0.000	Valid
Q5	0.806	0.000	Valid
Q6	0.745	0.000	Valid
Q7	0.774	0.000	Valid
Q8	0.719	0.000	Valid
Q9	0.718	0.000	Valid
Q10	0.584	0.001	Valid
Q11	0.732	0.000	Valid
Q12	0.679	0.000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan konsisten atau tidak. Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang sama bila dipakai untuk mengukur ulang objek yang sama. Item pertanyaan yang diuji reliabilitasnya adalah item-item pertanyaan yang telah lulus dalam pengujian validitas.

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Data

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman peraturan perpajakan	0.750	Reliabel
Layanan Layanan petugas pajak	0.728	Reliabel
Kontraprestasi tidak langsung	0.725	Reliabel
Kewajiban Perpajakan	0.715	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai *cronbach's alpha* pada masing- masing aspek lebih besar dari 0.06. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Tabel berikut menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan *one sample kolmogorov smirnov*.

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Resi
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,98665899
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,076
	Negative	-,160
Kolmogorov-Smirnov Z		,876
Asymp. Sig. (2-tailed)		,426

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2- tailed) sebesar 0.426. Karena signifikansi lebih dari 0.05 ($0.426 > 0.05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,366	16,384		,572	,572		
Pemahaman Perpajakan	,507	,244	,370	2,075	,048	,978	1,022
Layanan Layanan petugas pajak	,398	,268	,262	1,486	,149	,996	1,004
Kontraprestasi tidak langsung	,058	,271	,038	,214	,832	,979	1,021

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* ketiga variabel lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas.

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,366	16,384		,572	,572
Pemahaman peraturan perpajakan	,507	,244	,370	2,075	,480
Layanan layanan petugas pajak	,398	,268	,262	1,486	,149
Kontraprestasi tidak langsung	,058	,271	,038	,214	,832

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat probabilitas signifikansi variabel independen lebih dari 0.05 atau 5% , pada Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji F (F test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian ini pada Tabel 11 dapat dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 10,172 dan signifikan pada 0.000. Dengan menggunakan α (alpha) 0,05 atau 5% maka H_0 berhasil ditolak. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < α (alpha) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap layanan petugas pajak, dan persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen yaitu kewajiban perpajakan

Tabel 11 Hasil Uji F (F test)

Model	Sum of Squares	d f	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	276,108	3	92,036	10,172	,000 ^a
Residual	235,258	26	9,048		
Total	511,367	29			

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of-fit* dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,735 ^a	,540	,487	3,00806

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui nilai *adjusted R²* sebesar 0,540 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 54%. Hal ini berarti 54% kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi variabel pemahaman peraturan pajak, layanan layanan petugas pajak, dan persepsi kontraprestasi tidak langsung. Sedangkan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 13 bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Tabel 13 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

			a		
1	(Constant)	2,306	1,726		3,105 ,000
	Pemahaman peraturan perpajakan	1,714	,279	,376	2,559 ,017
	Layanan petugas pajak	5,234	,173	-,187	2,351 ,048
	kontraprestasi	0,845	,193	,769	5,418 ,000

Persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

$$Y = 2,306 + 1,714X_1 + 5,234X_2 + 0,845X_3$$

Keterangan:

- Y : Kewajiban perpajakan
- X₁ : Pemahaman peraturan perpajakan
- X₂ : Layanan petugas pajak
- X₃ : Kontraprestasi tidak langsung

Pembahasan

Nilai t untuk pemahaman peraturan sebesar 2,559 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan secara signifikan oleh WP EMKM. Ini menunjukkan bahwa jika WP EMKM paham apa konsekuensi yang mereka dapatkan jika mereka memenuhi atau tidak kewajiban tersebut. Akses informasi perpajakan yang lebih terbuka, grup-grup diskusi perpajakan yang banyak dan blog-blog perpajakan mendorong WP EMKM mulai memahami peraturan perpajakan.

Nilai uji t pada layanan petugas pajak menunjukkan nilai positif (t=2,351) dengan nilai signifikan sebesar 0,048 menunjukkan bahwa layanan petugas pajak memberikan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. WP EMKM menilai bahwa citra negatif yang sudah terlanjur melekat di benak mereka terkait petugas pajak (account representatif) perlahan-lahan mulai berubah. Mereka merasa bahwa petugas pajak sekarang lebih komunikatif dan lebih ramah. Ini sesuai dengan hasil kontra-prestasi yang bernilai positif dan signifikan.

Iklan layanan masyarakat terkait manfaat pajak bagi perekonomian mendorong WP EMKM melakukan kewajiban perpajakan mereka. Hanya saja hasil wawancara menunjukkan ada sedikit temuan bahwa salah satu unsur yang mendorong mereka melakukan kewajiban pajak adalah sanksi pajak yang dikenakan jika mereka terlambat melaksanakan kewajiban tersebut. Ada beberapa keluhan yang mereka sampaikan selain sanksi pajak misalnya semua perizinan yang selalu dikaitkan dengan perpajakan.

Wujud nyata yang diharapkan oleh para pengusaha akan profesionalisme dari pemerintah dalam mengelola hasil pajak bisa dilihat mulai dari hal yang kecil misalnya apakah pemerintah sudah secara serius menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum dengan baik misalnya sarana transportasi dan jalan, pendidikan, serta fasilitas umum lainnya, contoh lain adalah kemudahan bagi para pengusaha untuk mengurus surat-surat terkait dengan bidang usaha mereka, karena masih terdapat banyaknya keluhan dari para pengusaha yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha dikarenakan prosedur yang rumit.

Kondisi tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan para pengusaha enggan berurusan dengan instansi manapun termasuk dengan kantor pajak. Tetapi karena saat ini terdapat ancaman bahwa jika para pengusaha yang memiliki penghasilan diatas PTKP yang tidak memiliki NPWP akan diberikan sanksi berupa denda dua kali lipat dari jumlah pajaknya maka mau tidak mau para pengusaha tersebut akhirnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Hal ini dikarenakan oleh anggapan sebagian besar pengusaha bahwa dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku maka hal tersebut akan memperlancar usaha mereka, bukan karena para pengusaha tersebut sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan tetapi hanya sebatas untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat mengganggu kelancaran usaha mereka.

Untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah selaku pemegang otoritas pajak seharusnya mulai belajar untuk mengetahui bagaimanakah keinginan dan harapan para wajib pajak tentang penggunaan uang pajak yang telah mereka bayarkan. Semakin sesuai antara keinginan wajib pajak dengan pemanfaatan uang pajak yang mereka bayar, maka semakin senang mereka untuk membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman peraturan perpajak bisa menumbuhkan seseorang untuk sadar dalam membayar pajak.
2. Persepsi terhadap layanan petugas pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran citra negatif layanan petugas pajak menuju citra positif layanan.
3. Persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Pelayanan yang diberikan oleh layanan petugas pajak merupakan salah satu bentuk dari kontraprestasi tidak langsung yang bisa dirasakan oleh para pembayar pajak. Ketika para pembayar pajak dalam bertransaksi dengan pemerintah (layanan petugas pajak) mendapatkan kepuasan maka secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Rita (2003) *Introduction to Psychology* Edisi ke 14. New York. Harcourt Brace Jovanovich. Inc.
- Amirin, Tatang M (2011) *Populasi dan Sampel Penelitian*. Tatangmanguny wordpress.com.
- Adriani, D (2008) *Peraturan perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Burton, Richad (2005) "Cerita Pajak Bisakah Menyenangkan." *Artikel Bisnis Indonesia* (Juli). Jakarta http://klikpajak.com/artikel/artkl.php?article_id=5795, retrieved on 24 Oktober 2013.
- Ghozali, Imam (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* Edisi ke 5. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hariyani, Iswi (2010) *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- <http://www.pajak.go.id/content/fasilitas-pembayaran-pajak-bagi-pengusaha-dengan-omzet-tidak-melebihi-rp48-miliar-setahun>, retrieved on 06 November 2013.
- Ikhsan (2013) http://wartaekonomi.co.id/berita22104/ditjen-pajak-lakukan-optimalisasi-penerimaan-pajak-2014/related_news.html, retrieved on 12 Oktober 2013.
- Lard, P Feld and Bruno S Frey (2007) "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation". *Journal compilation Law and Social Policy*. Vol.29.No.1.January http://www.bsfrey.ch/articles/449_07.pdf, retrieved on 24 Oktober.
- Lumumba, Migwi S., et al. 2010. "Tax Payers' Attitudes and Tax Compliance Behaviour In Kenya". *African Journal of Business & Management*. Vol.1.April.11 pages http://www.uonbi.ac.ke/conferences/aibuma/journal/Paper9_TaxPayers_Attitudes_Lumumba.pdf, retrieved on 24 Oktober 2013.
- Priyatno, Duwi (2012) *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Media Kom.
- Purnomo, R. Serfianto Diby dan Hariyani, Iswi (2011) *Kitab Hukum Bisnis Properti*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. "Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu".
- Pratama, Margareth Ros (2012) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Prastowo, Yustinus (2008) *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rantung dan Priyono (2009) "Dampak program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan" *Simposium Nasional Akuntansi ke 5*. Surabaya <http://priyohari.files.wordpress.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf>, retrieved on 23 November 2013.
- Sekaran, Uma (2011) *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta